

ISLAM POPULER SEBAGAI PENCARIAN IDENTITAS MUSLIM KELAS MENENGAH INDONESIA

Wasisto Raharjo Jati
Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta, Indonesia
E-mail: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze the construction of identity in the case study of Middle-Class Muslim in Indonesia. The term “Popular Islam” is part of an academic term to mention of make Islam as an identity for the Middle-Class Muslim in Indonesia. This term can be interpreted into two premises are popular Islam as a commoditization of Islamic value and Islam as part of celebration Islamic day. Both of these terms later then forked between Islamization and indigenization thus creating their assorted shades of Middle-Class Muslim in Indonesia. Consumption then present a cultural sign to distinguish the Middle Class. It was later manifested in the mass cultural products on behalf of Islam. That image displayed on consuming the product and then create construction of an Islamic Middle Class, religious Middle Class, and the Arabized Middle Class. This paper will elaborate more deeply about in search of identity and its impact to Middle-Class Muslim in Indonesia.

Keywords: Popular Islam; Middle-Class Muslim in Indonesia; identity; mass popular culture.

Pendahuluan

Terminologi “Islam Populer” merupakan bentuk pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai budaya Islam dalam masyarakat. Akulturasi tersebut kemudian secara langsung maupun tidak langsung mengubah budaya Islam yang semula dipersepsikan sebagai budaya konservatif, konvensional, dan eksklusif menjadi lebih dinamis dan modernis. Ada berbagai contoh budaya Muslim populer tersebut mulai dari *fashion*, musik, gaya bahasa, maupun juga perilaku sehari-hari. Munculnya berbagai ragam produk Islam modern menunjukkan bahwa budaya Islam sebenarnya berjalan dinamis. Hadirnya Islam Populer

sendiri dapat dikatakan sebagai strategi adaptasi masyarakat Muslim dalam menghadapi dinamika zaman tanpa harus menanggalkan status sebagai umat. Komodifikasi nilai-nilai modernis dalam budaya Islam ternyata menghasilkan adanya masyarakat Kelas Menengah sebagai kelas yang memiliki karakteristik unik.

Islam Populer tersebut kemudian berkembang menjadi identitas dan habitus dalam kasus Kelas Menengah kontemporer. Adapun Islam Populer sebagai politik identitas sendiri dapat dimaksudkan sebagai bentuk konstruksi yang dilekatkan sebagai bentuk simbol komunal yang mengikat bersama. Secara lebih luas, pemaknaan terhadap konstruksi dimaksudkan bentuk “penempelan” simbol-simbol kultural yang kemudian menjadi identitas pribadi maupun kolektif. Pemaknaan terhadap konstruksi tersebut bisa disematkan baik dari kalangan internal maupun eksternal. Adanya konstruksi terhadap identitas tersebut erat dengan kebutuhan representasi dan juga rekognisi. Selama ini adanya stigmatisasi yang dialamatkan kepada umat Islam sebagai umat yang kolot dan koservatif setidaknya memberikan pengaruh negatif terhadap eksistensi umat Islam itu sendiri.

Kalangan Muslim Kelas Menengah ingin diakui sebagai masyarakat modern dengan menggunakan simbol-simbol modern. Namun demikian, modernitas yang simetris dengan adanya liberalisme, hedonisme, dan pengaruh westernisasi memberikan ruang negosiasi bagi Muslim Kelas Menengah berimprovisasi. Hasilnya kemudian Muslim Kelas Menengah yang memegang nilai *shar’i* sebagai pedoman nilai dan norma. Adapun Islam Populer sebagai “habitus” dimaknai sebagai bentuk perilaku yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan tersendiri yang membedakan dengan kelas lainnya. Konstruksi habitus itulah yang kemudian menjadikan posisi Muslim Kelas Menengah mengalami diferensiasi tersendiri. Pada akhirnya, pembahasan Muslim Kelas Menengah yang dibingkai dalam paradigma “Islam Populer” berkembang sebagai komunitas hibrid yang memadukan unsur Islam dan modernitas.

Kontestasi Status dan Makna Islam Populer

Pembahasan istilah “Islam Populer” sendiri sangat multi-interpretatif karena dapat dikaji dalam berbagai *scope*. Weintraub menjelaskan pengertian Islam Populer tersebut dalam empat analisis.

Pertama, tradisi lokal yang dipengaruhi oleh ajaran sufisme Islam sehingga menghasilkan adanya adat Islam lokal. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pola dakwah Islam yang beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang merupakan warisan kebudayaan Hindu. Maka, kemudian terciptalah pola sinkretisme Islam dalam masyarakat. Namun pada saat bersamaan, hadir pula kelompok Islam skripturalis yang menekankan adanya pengajaran Islam secara literal yang mengacu langsung pada al-Qurʾān dan Ḥadīth. *Kedua*, Islam Populer bukanlah dimaknai sebagai bentuk modernisasi Islam *an sich*. Budaya Islam Populer bisa dikatakan sebagai bentuk pinggiran dari modernisme yang lebih menampilkan sisi modernisme secara visual dan fisik. Adapun secara teologis, Islam Populer sendiri lebih menekankan pada fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan, yang terpenting masih tetap dalam koridor *sharʿi*. *Ketiga*, pengertian Islam Populer sendiri tidak disamaratakan dengan pengertian “populis” maupun mayoritas. Definisi tersebut mengandung makna lebih melihat penerapan Islam secara membumi dan inklusif yang mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat sehingga ajaran Islam dapat dilaksanakan secara praktis dalam masyarakat. *Keempat*, Islam Populer sendiri dapat dimengerti sebagai bentuk kebangkitan Islam yang menekankan pada pembangunan masyarakat.¹

Dengan kata lain, Islam Populer dapat diartikan sebagai bentuk hadirnya budaya Islam dalam ruang publik yang diinisiasi oleh Muslim Kelas Menengah. Ruang-ruang tersebut perlu dihadirkan sebagai upaya untuk mengenalkan Islam secara inklusif. Hadirnya Muslim Kelas Menengah memang memiliki hubungan fluktuatif dengan negara. Kajian Noorhaidi Hasan (2011) menyebutkan bahwa Islam Populer yang berkembang dalam Kelas Menengah Indonesia juga tidak terlepas dari politik akomodasi negara dengan penerapan asas tunggal. Hal itulah yang kemudian menarik peran politik Islam menjadi lebih mengarah pada pembangunan sosial. Kondisi itulah yang kemudian menciptakan “habitus” yang mengedepankan komoditisasi dan komodifikasi Islam secara berulang sebagai modal kultural sekaligus

¹ Andrew N. Weintraub, “The Study of Islam and Popular Culture in Indonesia dan Malaysia”, dalam Andrew N. Weintraub dkk, *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia* (New York: Routledge, 2011), 2-5.

identitas.² Dengan demikian, Islam Populer sebenarnya adalah modal kultural yang ingin diekspresikan Muslim Kelas Menengah dalam relasi sosialnya. Modal kultural tersebut merupakan bentuk komersialisasi dan komodifikasi terhadap simbol-simbol religius dalam komunitas Muslim. Munculnya masyarakat Muslim Kelas Menengah sendiri juga merupakan bagian dari proses emborjuaisasi kalangan santri-priyayi. Ekspresi simbol religius tersebut memang bagian dari proses pluralisme politik yang terjadi selepas Orde Baru di mana setiap unsur budaya dan politik ingin mendapatkan ruang berekspresi.

Islam Populer sendiri dianalisis dalam perspektif skripturalis sebagai bentuk islamisasi dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan Muslim Kelas Menengah tersebut. islamisasi dengan kata lain disebut hadirnya Islam dalam ruang publik kemudian dipahami dalam dua bentuk yakni islamisasi secara skriptural maupun islamisasi secara substansial. Islamisasi sendiri bertujuan menegakkan dakwah serta *amr ma'rūf nahy munkar* dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan di atas, pola islamisasi skriptural sendiri adalah proses islamisasi dalam masyarakat yang menekankan pengajaran nilai-nilai, norma, dan petuah dalam al-Qur'ân dan Ḥadīth secara literal. Hal itulah yang kemudian mendorong adanya formalisasi secara legal shari'ah Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Dorongan untuk menghadirkan formalisasi Islam menciptakan adanya kelompok *militia-milita* Islam seperti halnya FPI, FBR, Laskar Jihad, dan lain sebagainya. Mereka merupakan bagian dari proses tumbuhnya Kelas Menengah baru Islam yang terbebas dari marjinalisasi dan ketimpangan ekonomi-politik Orde Baru. Implikasinya kemudian adalah kemunculan pemahaman radikal-ekstremis yang hingga kini masih ada dalam kelompok masyarakat Kelas Menengah tertentu.

Wilson sendiri menyebutkan bahwa munculnya militansi dan ekstremisme teologis yang terjadi dalam kasus Muslim Kelas Menengah merupakan ekspresi dari kebutuhan keamanan dan juga perlindungan terhadap masyarakat.³ Dalam hal ini, dalil teologis yang bersumber pada al-Qur'ân dan Ḥadīth digunakan untuk melegitimasi kedua tujuan

² Noorhaidi Hasan, *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politic* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 145-147.

³ Ian Douglas Wilson, *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia* (London: Routledge, 2015).

tersebut di mana umat Muslim, pasca Orde Baru tumbang, memerlukan tempat untuk berpijak. Maka, logika kekerasan kolektif maupun juga monopoli terhadap area publik tertentu digunakan untuk menyediakan tempat bagi Muslim Kelas Menengah tersebut. Munculnya organisasi *militia* seperti telah disebutkan di atas juga dapat dikatakan sebagai bentuk aksi kolektif berebut “kue ekonomi-politik” yang tersebar di kawasan urban Jakarta. Namun demikian, pola radikalisme dan ekstremisme di kalangan Kelas Menengah urban kemudian lebih mengarah pada komunitas-komunitas Muslim saja. Persoalan tersebut lebih merujuk pada ekspresi identitas, kuasa, maupun juga rekognisi sebagai sebuah Muslim Kelas Menengah.

Oliver Roy (2003) melihat munculnya ekstremisme dalam Muslim Kelas Menengah di Indonesia merupakan bentuk cara untuk mengislamkan masyarakat melalui aksi sosial dan politik.⁴ Pilihan untuk mengislamkan masyarakat kemudian ditempuh dalam dua hal yakni secara Salafi-tradisional dan juga modernis. Salafi lebih condong mengislamkan masyarakat Muslim sehingga membentuk komunitas-komunitas ideologis. Sedangkan kalangan modernis lebih melihat kepada adaptasi dan akulturasi nilai modernis dengan nilai Islam. Satu hal menarik yang perlu dicermati sebagai dasar analisis mengenai Islam Populer tersebut adalah munculnya fenomena Post-Islamisme. Fenomena tersebut hadir sebagai bentuk kritik terhadap kemunduran pembangunan masyarakat Muslim yang dilakukan oleh kalangan Salafi ternyata tidak mendapatkan pengaruh luas. Sebaliknya, radikalisme tersebut justru kian mendiskreditkan Islam baik secara sosial maupun teologis. Roy kemudian mendefinisikan Post-Islamisme sebagai bagian dari *privatization of Islamization* yakni proses pembentukan kesalehan sosial lebih bersifat pribadi.

Adapun premis Post-Islamisme menurut Asef Bayat adalah transformasi dalam islamisasi, yang awalnya mengarah pada pembentukan negara Islam, kini lebih merujuk pada pembentukan sikap kesalehan sosial baik secara individu, kolektif, humanitarianisme, dan deradikalisasi.⁵ Post-Islamisme sendiri merupakan antitesis

⁴ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), 36.

⁵ Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movement and The Post-Islamist Turn* (Stanford: Stanford University Press, 2007), 9-10.

terhadap pembangunan masyarakat ala Salafi yang tidak menghendaki adanya modernisasi. Hal itu justru membuat kalangan masyarakat Muslim kian termarginalkan dan didiskreditkan karena tidak mampu beradaptasi dengan zaman. Dengan kata lain, Post-Islamisme sendiri menekankan pembangunan masyarakat Muslim Kelas Menengah berbasis pada tiga aspek, yakni menekankan hak daripada kewajiban, pro terhadap pluralitas daripada otoritarian, dan melihat masa depan daripada masa lalu. Hal ini berarti bahwa Post-Islamisme sendiri lebih melihat pada pembangunan masyarakat lebih menuju modernitas. Gagasan utama dalam Post-Islamisme sebagaimana diusung oleh Bayat sendiri adalah menekankan sinergisitas Islam, modernisme, demokrasi, dan pluralitas. Maka, memaknai Post-Islamisme dalam kaitannya dengan Islam Populer lebih dikaitkan dengan upaya membentuk wajah Islam yang inklusif dan adaptif dengan modernitas zaman melalui pembentukan umat.

Diseminasi gagasan Post-Islamisme dalam membentuk Muslim Kelas Menengah sendiri sebenarnya adalah upaya melawan ortodoksi Islam untuk mendirikan negara Islam. Revivalisme terhadap radikalisme dan ekstremisme pemahaman Islam terhadap Muslim Kelas Menengah juga merupakan bentuk diskontinuitas terhadap negara Islam yang tertunda. Premis tersebut kemudian dikaitkan dengan masalah ketimpangan dan marginalisasi terhadap umat Muslim minoritas dari kalangan mayoritas. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada terbentuknya jaringan terorisme. Popularitas terhadap radikalisme sendiri bukan saja merupakan pilihan, namun juga bisa menjadi realitas yang perlu dikaji. Adapun pengertian Islam Populer menurut pandangan Islam substansial sendiri lebih mengarahkan kepada aspek religiositas dan humanitarianisme. Pengajaran terhadap nilai, norma, dan ajaran dalam al-Qur'ân dan Ḥadīth sendiri disesuaikan dengan konteks dinamika zaman. Modernisme merupakan bentuk keniscayaan yang perlu dihadapi dengan menyesuaikan kadar pemahaman Islam sesuai dengan garis modernisme itu. Jika dianalisis secara elaboratif, pemahaman status dan peran Muslim Kelas Menengah menurut pandangan Post-Islamisme ini lebih condong melihat pada peran Kelas Menengah sebagai basis pembentuk umat masyarakat madani. Implikasinya kemudian berdampak pada pembentukan sikap, nilai, dan norma Muslim yang

ingin ditonjolkan. Dalam hal ini, posisi Islam Populer yang diemban oleh Muslim Kelas Menengah yang mengambil jalan moderat lebih kepada ekspresi sosial-kebudayaan. Namun, premis tersebut juga bisa menjadi perdebatan mengingat posisi Muslim Kelas Menengah yang mengambil jalan Islam skriptural sendiri juga menginisiasi negosiasi terhadap Islam Populer tersebut. Hasilnya kemudian Islam Populer sendiri kemudian menempuh dua arah.

Heryanto memberikan garis demarkasi yang begitu jelas dalam membedakan Islam Populer yang terlahir dari jalur budaya populer dengan yang muncul dari formalisasi agama.⁶ *Pertama*, munculnya gerakan Islam Populer yang terlahir dalam *scope* formalisasi agama merupakan bentuk ekspresi dari marjinalisasi kelas selama rezim otoritarian. Mereka yang terpinggirkan dalam proses modernisasi, yang justru menyebabkan adanya dekadensi sosial dan moralitas dalam masyarakat, kemudian melihat adanya ruang dan peluang untuk memopulerkan agama sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Adanya perasaan disingkirkan dan dimarjinalkan itulah yang kemudian menjadi arus awal terbentuknya radikalisme dalam masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terbentuknya simpul-simpul terorisme. Menguatnya ideologi radikal sendiri juga bisa diartikan sebagai bentuk budaya populer karena sifatnya yang turun ke bawah ke masyarakat dan kemudian mengindoktrinasinya. Persemaian ideologi tersebut pada dasarnya bermula dari adanya semangat Pan-Islamisme maupun Teologi Pembebasan yang melihat Islam menjadi agama yang inferior. Hal tersebut kemudian mengarahkan pada berkembangnya teori-teori konspirasi yang menuduh Barat dan Zionis sebagai sasaran utamanya. Hal itulah yang kemudian mendorong adanya berbagai gerakan *counter* untuk melawan eksekusi negatif tersebut. Agama kemudian ditafsirkan secara literal untuk menjustifikasi adanya tindakan kekerasan. *Kedua*, Islam Populer yang tumbuh dalam komoditisasi simbol-simbol Islam ini merupakan bentuk respons dari kapitalisasi industri terhadap sisi ketakwaan Islam. Pada umumnya kekuatan Islam Populer ini menjadi resistor utama dalam mereduksi pengaruh islamisasi yang ditawarkan oleh formalisasi agama. Hal itu dikarenakan kelompok Islam Populer sendiri adalah kalangan Muslim yang

⁶ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2015), 61-70.

sebenarnya skeptis terhadap perubahan rezim yang begitu cepat. Apalagi tendensi formalisasi agama kemudian mengarahkan pada terbentuknya negara shari'ah. Sementara dalam kalangan umat Muslim sendiri masih terfragmentasi dalam menyikapi isu tersebut.

Kedua gelombang tersebut merupakan bentuk pencarian identitas baru yang perlu didefinisikan secara bersama. Manakala negara sudah puna dalam merumuskan identitas bagi warga negara, momentum itulah yang kemudian menjadi kesempatan untuk perumusan identitas baru. Kebangkitan identitas Muslim di Indonesia sendiri sebenarnya baru muncul sebagai respons atas berkembangnya budaya populer Asia Timur maupun juga Amerika. Dalam tahapan ini, kelompok Kelas Menengah Indonesia kemudian dihadapkan pada banyaknya ragam pilihan untuk diadopsi. Menguatnya budaya Asia Timur kemudian memopulerkan budaya Harajuku di kalangan anak muda Indonesia, sementara bagi kalangan Barat sudah ditandai dengan munculnya berbagai macam kafe, distro, dan lain sebagainya. Kondisi itulah yang kemudian menjadikan kegamangan bagi kalangan Muslim Kelas Menengah untuk mencari rupa bentuk, ruang, dan identitasnya dalam masyarakat.

Analisa Heryanto tersebut terlihat dalam upaya memopulerkan Islam sebagai jalan utama bernegara (*game in the town*). Kegamangan tersebut dapat dilihat dari munculnya sisi paradoks yang ditampilkan ketika intensifikasi gerakan Islami itu menguat dengan munculnya partai politik Islam maupun juga gerakan Islam yang tujuannya untuk menguatkan politik Islam beserta shari'ahnya. Namun manakala dihadapkan pada arena kompetisi politik formal, mayoritas publik justru lebih memilih partai nasional daripada partai Islam. Oleh karena itulah, bisa dikatakan bahwa revivalisme Islam dalam level masyarakat sendiri sebenarnya belumlah menuju pada level formal. Islam Populer masih berada dalam tataran produksi budaya massa yang kemudian mengonstruksikan orang menjadi Islam karena produk "islami" yang mereka gunakan.

Dalam perspektif lain, perbedaan antara Islam Populer yang lunak (*soft diplomacy*) dengan Islam Populer yang garis keras (*hard-liner diplomacy*) dapat dibedakan pula dengan sisi kebutuhan dalam menjabarkan nilai-nilai keislaman tersebut dalam kehidupan. Selama ini kiblat dalam merumuskan Islam Populer dalam kasus Muslim Kelas

Menengah Indonesia terpecah antara aliran Mesir-Turki dengan aliran Arab Saudi meskipun tidak menampik pula kiblat juga mengarah pada Iran sebagai poros Shi'ah sebagai pembentuk identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. Adanya penentuan kiblat ketiga negara tersebut juga tidak terlepas dari peta dakwah dan juga jaringan intelektualisme antara Indonesia dengan negara-negara Teluk sejak era lampau. Hal itulah yang kemudian membekas hingga kini untuk kemudian meromantisir adanya kenangan bersejarah itu.

Gelombang munculnya produk Islam Populer di kalangan Muslim Kelas Menengah di Indonesia sendiri pertama kali dinisiasi dengan munculnya Gelombang Mesir dalam konstruksi budaya Islam Populer Indonesia. Adalah *booming* film *Ayat-ayat Cinta* yang diadaptasi dari novel Habbiruhman el-Shirazy pada tahun 2004 yang menceritakan kehidupan drama mahasiswa Indonesia selama menuntut di Universitas al-Azhar dan dinamikanya dalam menghadapi situasi pelik antara ketaatan dalam beragama dan toleransi terhadap perbedaan. *Setting* Mesir tersebut memberikan dampak signifikan dalam pertumbuhan nilai, norma, dan perilaku secara Islam.⁷ Hal tersebut kemudian berlanjut pada novel berikutnya seperti halnya *Dalam Mibrab Cinta* dan *Ketika Cinta Bertasbih* yang kemudian melihat sisi-sisi nilai Islam yang ingin ditonjolkan berdasarkan pengalaman penulisnya selama di Mesir.

Dalam hal ini, adanya *booming Ayat-ayat Cinta* di berbagai bioskop layar lebar kemudian menstimulus adanya penguatan budaya-budaya Mesir ke Indonesia misalnya dari *hijab*, *syisa*, *fashion*, dan lain sebagainya. Citra Mesir bersama pula Turki yang ditampilkan lebih moderat daripada negara-negara Arab lainnya yang cenderung konservatif setidaknya menjadi salah satu barometer penting dalam kiblat Muslim Kelas Menengah Indonesia. Hal ini juga tak terlepas dari kultur Islam di kedua negara tersebut yang cukup padu dalam memadukan Islam dan modernisme dalam satu tempat sehingga menampilkan wajah Islam yang cair dan dinamis. Oleh karena itulah, banyak kemudian inspirasi muncul dari kalangan Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam menyontoh budaya populer Turki dan Mesir dalam kesehariannya. Dalam kultur kedua negara tersebut, masalah artikulasi

⁷ James Hoesterey dan Marshall Clark, "Film Islami: Gender, Piety and Pop Culture in Post-Authoritarian Indonesia", *Asian Studies Review*, Vol. 36, No. 1 (2012), 215-217.

Islam sebagai formalisasi politik tidaklah terlalu perlu ditonjolkan secara kuat; namun bagaimana Islam kemudian berkembang secara populis sebagai basis dasar pembangunan. Dari situ berkembanglah “budaya *ikhwân*” yang kemudian menggejala dan menjalar di berbagai kampus di Indonesia.

Mengembangnya budaya populer ikhwan ini juga tidak terlepas dari semakin menguatnya forum silaturahmi dakwah antarkampus oleh kampus-kampus di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat tersendiri. Adanya pengalaman Mesir dan Turki yang sukses di bawah Partai Ikhwan kemudian dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia dengan mengusung *Ikhwaniisme* yang sama. *Ikhwaniisme* sebenarnya merupakan bentuk ideologi waralaba yang berkembang pesat di Mesir dan Turki untuk membentuk masyarakat Muslim modern yang *shar‘i*. Namun kemudian ketika hal itu diimplementasikan di Indonesia justru *Ikhwaniisme* tersebut berkontestasi dengan modernisme maupun juga tradisionalisme yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

Kiblat kedua yakni Arab Saudi sendiri sebenarnya lebih mengutamakan adanya implementasi Islam secara ketat yang kemudian “mendalilkan” bahwa tradisi Arab Wahabi adalah representasi dari Islam yang murni sesungguhnya. Meskipun dikatakan bahwa budaya Islam yang dibawa oleh tradisi Arab ini sangatlah ketat, namun hal tersebut ternyata tidak menjadi soal ketika terdapat beberapa kelompok Muslim Kelas Menengah Indonesia yang kemudian mencontohnya dan dijadikan sebagai identitas kelompok. Alasan penting ketika menganut budaya populer Arab itu tentunya ingin kembali kepada ajaran ketauhidan agama yang asli berdasarkan al-Qu’rân dan Ḥadîth ketika zaman Nabi Muhammad. Implikasinya kemudian adalah fenomena Arabisasi di mana budaya populer semakin diperkuat dengan dalil agama untuk memperoleh legitimasinya. Konteks Arabisasi sendiri kemudian menghasilkan masyarakat Muslim yang hidup sesuai dengan tarekat-tarekat seperti Naqshabandîyah, Qâdirîyah, dan lain sebagainya.

Adapun untuk kasus budaya populer Iran sebenarnya menarik untuk ditelisik mengingat Iran yang selama ini dianggap sebagai poros Shî‘ah sering dianggap bertentangan dengan kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia. Namun yang menarik adalah budaya

Shi'ah sendiri kemudian berkembang dalam kultur pesantren-pesantren di Indonesia misalnya saja ritual shalawatan, berzanji, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian banyak gagasan intelektualisme para sarjana Muslim yang berasal Qom banyak dipelajari di kalangan pesantren, meskipun tidak menampik keindahan permadani Isfahan yang juga menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia. Jika dikomparasikan ketiga kiblat Islam Populer tersebut, dalam kasus Muslim Kelas Menengah Indonesia, dapat dijelaskan melalui tabulasi berikut ini.

Tabel 1:
Komparasi Kiblat Budaya Islam Populer dan Muslim Kelas Menengah Indonesia

No	Kiblat Budaya	Bentuk Produk	Contoh Muslim Kelas Menengah	Kasus Kelas
1	Mesir-Turki	Nasyid, <i>Hijab</i> Turban, <i>Ikhwanisme</i> , pengajian sufisme, dan produk Islam modern lainnya	Kelompok intelektual kampus, kelompok Kelas Menengah urban, dan majelis <i>ta'lim</i>	
2.	Arab Saudi	Celana cingkrang, pemeliharaan jenggot dan kumis, pemakaian <i>cadar</i> , dan lain sebagainya	Kelompok Kelas Menengah <i>hard-liner</i> , misalnya HTI dan MMI	
3	Iran	Pembacaan Barzanji, Shalawat, Kenduri, Permadani dan intelektualisme Qom	Kalangan pesantren dan pedesaan.	Muslim dan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Ketiga kiblat tersebut menunjukkan adanya variasi produk yang kemudian menciptakan ketiga Muslim Kelas Menengah tersebut. Harus diakui bahwa ketiga varian tersebut juga mengindikasikan pula garis ideologis masing-masing mazhab Islam yang dianut. Dalam kasus Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa kasus islamisasi versus formalisasi tidaklah terlalu menonjol kompetisinya di tingkat formal. Dalam level kemasyarakatan pun sebenarnya ketiga arus kelompok Muslim Kelas Menengah tersebut sebenarnya saling menjaga wilayah

afiliasi dan afinitasnya masing-masing. Demarkasi terhadap munculnya Islam Populer tersebut juga mengindikasikan bahwa adanya kemampuan diplomasi dan negosiasi Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam mengekspresikan identitasnya. Kesalehan sosial (*social piety*) yang menjadi tujuan utama dalam mengonstruksi Kelas Menengah Islam kemudian mengalami percabangan. Dalam hal ini, kita bisa melihat ada dua perspektif besar, yang sebenarnya memberi kerangka Islam Populer, yakni islamisasi dan juga Post-Islamisme. Islamisasi dimaknai lebih pada orientasinya mendukung adanya formalisasi agama melalui upaya meraih pengaruh, sedangkan Post-Islamisme lebih kepada praktiknya yang mengarah pada perilaku simbolis saja.

Apabila Muslim Kelas Menengah mengambil posisi Post-Islamisme, maka hal tersebut lebih mengarah pada pembentukan kesalehan sosial. Bagi Kelas Menengah yang mengambil jalan secara skriptural lebih berupaya memopulerkan Islam sebagai bentuk *nation-state* yang tujuannya adalah membuat “rumah besar” umat Muslim yang disesuaikan dengan nilai, norma, dan perilaku Muslim. Jeremy Menchik menyebutnya sebagai “nasionalisme ketuhanan”.⁸ Istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa model nasionalisme di Indonesia sendiri pada dasarnya tidaklah diikat dalam pemahaman sekuler. Namun lebih diikat dalam bentuk ikatan religiositas berbasis kepercayaan agama. Hal itu yang kemudian berpengaruh pada terbentuknya *nation-state*. Meskipun demikian, fondasi nasionalisme ketuhanan melihat bahwa terdapat diferensiasi dalam *nation-state* tersebut di mana terdapat faksi-faksi umat berbasis teologi. Secara garis besar, konsepsi nasionalisme ketuhanan sendiri dapat dianalisis sebagai berikut 1) mendorong adanya kepercayaan monoteisme, 2) memilih salah satu agama diakui, 3) mengikuti ajaran agama berbasiskan teologi yang dianut. Hal ini berbeda dari pemahaman nasionalisme konvensional yang menitikberatkan pada pembangunan *sense of belonging* berdasarkan pada simbol. Nasionalisme ketuhanan lebih melihat pada ikatan *nation* didasarkan atas ajaran teologis. Oleh karena itulah, negara bukan merupakan sumber untuk dipatuhi, namun sumber asli seperti al-Qur’ân, Ḥadīth, maupun juga ijtihad ulama yang diikuti. Makanya

⁸ Jeremy Menchik, “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”, *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 56, No. 3 (2014), 591-621.

kemudian, sikap saling *stereotyping* dan *prejudice* acap kali tersebar antar faksi kelompok masyarakat Islam tersebut untuk mengklaim kebenaran masing-masing. Pada dasarnya, tujuan kelompok Muslim Kelas Menengah radikal itu sama, yakni memopulerkan Islam sebagai nilai, norma, dan perilaku yang dipatuhi, tetapi cara yang ditempuh kemudian salah karena cenderung memaksakan kehendak.

Ketiga premis tersebut kemudian berdampak pada radikalisasi Muslim Kelas Menengah untuk memopulerkan Islam sebagai jalan utama paska Orde Baru. Implikasinya kemudian menghasilkan adanya kelompok Muslim Kelas Menengah garis keras seperti halnya Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Anti Pemurtadan, dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi yang ditampilkan untuk menampilkan citra Islam Populer dari segi “revivalisme Islam politik” dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2:
Komparasi Ekspresi Budaya Populer Formalisasi Agama

No	Bentuk ekspresi Islam Populer	Jenis atau Karakter Organisasi	Contoh Organisasi
1	<i>Amr Ma'rūf Nahy Munkar</i>	Paramiliter, Militia Sipil, <i>Vigilante Groups</i>	FPI, FBR, FPIS, FUI,
2	Syariatisasi Islam	Militia Sipil	Forum Anti Pemurtadan, Gerakan Indonesia Bersharî'ah, Majelis Mujahidin Indonesia
3	Kekhalifan Islam	Organisasi non-Negara	Hizbut Tharir Indonesia (HTI)
4	Keamanan Kolektif	Sayap Organisasi	Gerakan Pemuda Ka'bah, Banser, Tapak Putih.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Terhadap ragam ekspresi identitas yang dilakukan oleh kelompok Muslim Kelas Menengah militan tersebut kita bisa melihat adanya kesamaan dalam artikulasi kepentingan yang diajukan, yaitu lebih bermuatan ideologis. Adanya usaha memopulerkan Islam secara politis sebenarnya merupakan bagian dari upaya meneguhkan identitas

kolektif. Namun yang disayangkan kemudian adalah jalan yang ditempuh dilakukan dengan cara kekerasan terhadap kelompok lainnya.

Dalam hal ini, jalan kekerasan yang ditempuh dalam memopulerkan Islam sendiri dapat dianalisis dalam dua perspektif. *Pertama*, kebutuhan maskulinitas. Selama ini ekspresi kegiatan yang sifatnya fisik dan memacu adrenalin dilarang oleh Orde Baru karena diasumsikan akan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, ketika suasana kacau (*chaotic*) pasca-runtuhnya Orde Baru muncul, hal inilah yang kemudian membuka celah terhadap aksi kekerasan sebagai jalan ekspresi identitas. Payung organisasi Islam yang tujuannya untuk menegakkan Islam sebagai mekanisme penegakkan order (*order establishment*) kemudian melihat aksi kekerasan sebagai bagian dari pembentuk intimidasi psikologis maupun koersif. *Kedua*, adanya kebutuhan ruang ekspresi yang diinginkan secara meluas oleh umat Muslim Indonesia pasca reformasi yang selama ini dikooptasi oleh militer dan birokrat. Dalam hal ini, pengertian “ruang” tidaklah selalu merujuk pada pemberian kebijakan populis yang memihak dengan rezim, namun lebih diartikan sebagai upaya membentuk komunitas tersendiri. Kondisi itulah yang kemudian mendorong berbagai macam pengelompokkan Muslim Kelas Menengah berdasarkan garis ideologi yang mereka anut. Namun demikian, yang menjadi ironis adalah kelompok-kelompok Islam menengah tersebut kemudian saling berkontestasi satu sama lain dengan mengatasnamakan agama. Indikasi-indikasi semacam ini sebenarnya menghasilkan adanya temuan bahwa model dakwah yang berkembang pasca Orde Baru mengarah pada terbentuknya umat Islam yang puritan.

Eskalasi dari ekspresi puritanisme tersebut kemudian tergambar dalam berbagai macam konflik yang pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan “kejantanan” dan juga ruang. Puncaknya adalah pengeboman WTC 2001 yang diikuti dengan stigmatisasi Islam melalui kampanye global melawan terorisme. Hal tersebut semakin menguatkan adanya sisi puritanisme Islam yang kemudian semakin memperlihatkan sisi gelapnya bahwa Barat adalah musuh Islam yang kemudian diwujudkan dalam aksi perang ke negara-negara Timur Tengah. Adanya eskalasi global itulah yang semakin menggelorakan Arab sebagai kiblat Islam Populer di Indonesia. Di satu sisi, dengan berkembangnya gejala Arab sendiri merupakan bentuk emansipasi bagi

umat Muslim Indonesia sebagai saudara satu iman. Namun di sisi lainnya, berkembangnya budaya Arab juga mengindikasikan adanya kebutuhan pencarian identitas Islam yang orisinal berasal dari Arab. Kebutuhan tersebut kemudian menumbuhkan berbagai macam majelis *ta'lim* hingga level *liqâ'* dan *ḥalâqah*. Meskipun itu bisa dikatakan sebagai bagian dari proses kaderisasi politik terhadap masyarakat, implikasinya kemudian adalah kemunculan gejala Arabisasi terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Tampilan sisi puritan itulah yang menghasilkan temuan budaya Arab yang kemudian masuk ke Indonesia.

Sisi puritan tersebut kemudian berkelindan dengan semakin berkembangnya budaya Arab yang melanda di beberapa kelompok masyarakat. Indikasinya bisa dilihat adanya pemakaian *burqa* dan cadar bagi perempuan maupun bentuk pemeliharaan jenggot dan kumis serta bercelana cingkrang bagi laki-laki. Identitas tersebut belum ditambah dengan adanya selipan percakapan dengan bahasa Arab dalam pergaulan. Kata-kata familiar seperti halnya *abî* (bapak), *ummi* (ibu), *anâ* (saya), *antum* (kamu), *shukran* (terima kasih), maupun *jazâkum Allâh* (semoga Allah membalas [kebaikan]mu) merupakan segelintir kata yang sering diucapkan untuk memulai pembicaraan. Entah apa maksudnya, kemudian pemakaian dan penyisipan Bahasa Arab tersebut digunakan oleh beberapa kelompok Muslim Kelas Menengah. Meskipun tidak ada niat untuk berpretensi bahwa kelompok Kelas Menengah pengguna bahasa Arab tersebut dikaitkan dengan adanya isu radikalisme, namun yang jelas perilaku tersebut merupakan bagian dinamika Muslim Kelas Menengah dalam mencari kiblat dalam merumuskan kembali identitas keislaman mereka. Usaha pencarian identitas Muslim Kelas Menengah itulah yang selanjutnya membentuk adanya simbol-simbol yang menjadi pemersatu dan juga sebagai penjaga moral.⁹ Dalam hal ini, terdapat arus kuat dalam kontestasi puritanisme, modernitas maupun tradisionalisme untuk memopulerkan diri untuk mengonstruksi identitas Muslim Kelas Menengah baru. Ketiganya, secara tidak langsung, juga menunjuk adanya organisasi keagamaan yang menaunginya sehingga membentuk karakteristik sedemikian rupa. Namun demikian, konstruksi tersebut

⁹ Manneke Budiman, "The Middle Class and Morality Politics in The Envisioning of the Nation in Post-Suharto Indonesia", *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 12, No. 4 (2011), 484-485.

juga semakin memudar karena umat Muslim Kelas Menengah yang kini semakin fleksibel dalam mobilitas.

Tulisan ini tidak berupaya untuk menjelaskan mana hitam dan putih terhadap faktor pembentuk budaya populer dan identitas Muslim Kelas Menengah ditinjau dari ketiga spektrum tersebut. Hal yang menjadi penting untuk menganalisis itu adalah adanya kebutuhan masyarakat Muslim Kelas Menengah tersebut untuk hidup dalam suasana ketenteraman sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, konteks kesalehan (*piety*) kemudian menjadi kata penting dalam memberi kerangka terhadap perilaku Muslim Kelas Menengah sekarang ini yang kemudian bersambung dengan adanya kebutuhan kepuasan (*pleasure*) yang didapatkan dari proses ibadah di mana dengan mengonsumsi berbagai produk berbau simbol Islam, maka dengan sendirinya mereka dicitrakan sebagai kalangan saleh. Hal itulah yang sebenarnya menciptakan anomali dalam melihat sisi ketakwaan dan kesalehan umat Muslim Kelas Menengah sekarang ini.

Islam Populer, Budaya Populer, dan Kelas Menengah Indonesia

Perbincangan mengenai Islam Populer, yang dikaitkan dengan mewabahnya budaya populer yang berkembang di Indonesia, menarik untuk dicermati selain mencermati Islam Populer melalui gerakan islamisasi. Dalam tataran ini, budaya populer kemudian dibahasakan sebagai komoditisasi kultural lewat berbagai suara, gambar, maupun pesan yang diproduksi secara massal dan komersial (termasuk juga busana, musik, perumahan, dan kebutuhan primer sekunder lainnya) ditujukan untuk masyarakat sebagai konsumennya. Pengertian kedua, budaya populer sendiri dapat diartikan sebagai bentuk perayaan, selebrasi, maupun festival yang bertujuan untuk menarik massa melalui berbagai macam pertunjukan seni budaya oleh masyarakat kepada masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, pengertian Islam Populer jika dikaitkan dengan budaya populer secara sederhana dapat dijabarkan sebagai bentuk komoditas barang maupun ritual yang diterima secara komersial dan komunal sebagai bagian pembentuk Muslim Kelas Menengah. Gejala komoditisasi barang melalui simbol Islam sebenarnya dapat dilihat dari sejak adanya liberalisasi aturan yang memungkinkan Islam

¹⁰ Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan*, 22.

dapat diekspresikan selain gerakan politik. Hal itulah yang kemudian mendasari terbentuknya Harian Republika, Bank Muamalah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Badan Amal, Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) di akhir era Orde Baru. Sebelum itu, adanya rekognisi terhadap jilbab untuk dipakai dalam kegiatan publik secara luas. Hal itulah yang kemudian mendorong transformasi identitas jilbab yang, semula hanya dimaknai secara teologis, kini sudah merambah pada relasi sosial kemasyarakatan. Implikasinya adalah bahwa jilbab diterima sebagai bagian dari budaya populer massa di kalangan wanita masa kini. Selain halnya jilbab, label “halal” juga merupakan bagian dari sosialisasi budaya populer Islam yang kemudian menyebar luas. Awalnya label tersebut hanya berlaku eksklusif bagi kalangan umat Muslim, namun kemudian labelisasi tersebut justru menyebar luas. Terdapat nilai kepercayaan bagi publik terhadap label “halal” tersebut yang menjadi jaminan bahwa suatu produk, makanan dan minumannya misalnya, layak untuk dikonsumsi.

Munculnya Republika, Bank Muamalah, ICMI, maupun BAZIS tersebut adalah produk budaya populer Islam yang merupakan hasil negosiasi dengan pemerintah. Negosiasi tersebut merupakan bentuk sikap kecurigaan terhadap munculnya revivalisme Islam pasca-tahun 1990-an sehingga kemudian membatasi ruang gerak umat Islam. Adalah ICMI yang kemudian menjamin bahwa produk-produk yang mengatasnamakan kepentingan umat Muslim tersebut bukanlah diarahkan kepada bentuk artikulasi politik, namun lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup umat saja. Sebenarnya kesemuanya itu merupakan bentuk akomodasi politik yang ditawarkan oleh Orde Baru terhadap umat Muslim. Dari situlah kemudian, produk budaya populer Islam mengalami perkembangan pesat dalam masyarakat. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari adanya amalgamasi Islam dengan modernisme sehingga menampilkan sisi Islam yang dinamis, bukan Islam yang selama ini dicap konservatif.

Memasuki era Reformasi kemudian ditandai dengan munculnya berbagai macam ekspresi budaya populer yang ditimbulkan dalam berbagai bentuk seperti musik, film, busana, konsumsi, dan lain sebagainya. Merebaknya berbagai macam produk yang menyimbolkan nafas Islam tersebut tidak terlepas dari semakin diterimanya Islam tidak hanya sebagai ajaran teologis, namun sudah menjadi panduan nilai,

norma, dan perilaku. Berkembangnya Islam sebagai agama sipil (*civil religion*) juga sebenarnya tak terlepas dari Islam yang menempati posisi mayoritas di negara ini. Namun alih-alih untuk memaksakan adanya syariat, tumbuhnya Kelas Menengah moderat lebih mendorong Islam hanya sebagai panduan untuk mendorong kewajiban-kewajibannya bukan dimaksudkan untuk memaksakan kehendaknya.¹¹ Adanya akulturasi nilai-nilai Islam terhadap kultur masyarakat secara tidak langsung menjadikan proses pendisiplinan terhadap masyarakat. Pendisiplinan tersebut diselaraskan dengan masjid sebagai pusatnya untuk mendorong masyarakat selalu bertindak saleh.

Tumbuh berkembangnya beberapa masjid di berbagai kampung di kota-kota besar Indonesia juga merupakan bentuk dari bagian budaya populer Islam. Masjid sendiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, namun secara simbolis juga merupakan tanda seberapa saleh masyarakat tersebut menjalankan ibadah. Hal itulah yang kemudian menjelaskan alasan masjid menjadi simbol prestise bagi kelompok masyarakat setempat bahwa semakin bagus dan ramai suatu masjid maka semakin salehlah masyarakat itu. Implikasinya adalah maraknya pengajian maupun juga semakin kuatnya pengaruh dakwah dalam Kelas Menengah. Muslim Kelas Menengah memerlukan adanya sentuhan rohani di tengah modernitas kota yang semakin hedonistik. Selain karena memang karena kebutuhan rohani dan simbol kesalehan, fungsi masjid bagi Muslim Kelas Menengah juga sebagai penanda dominasi umat Muslim dalam masyarakat. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap implementasi nilai Islam dalam masyarakat secara tidak langsung.

Di tengah iklim yang serba plural dan modernis itulah maka kemudian sikap dan preferensi Muslim Kelas Menengah, di tengah membanjirnya berbagai macam produk budaya populer sendiri, juga beragam. Terdapat empat karakteristik perilaku Muslim Kelas Menengah yang perlu ditinjau dan dianalisis dari penerimaan mereka terhadap Islam yakni rasionalis, universalis, apatis, dan konformis.¹² Muslim Kelas Menengah apatis adalah Kelas Menengah yang bisa dikatakan sebagai Kelas Menengah “Islam KTP”. Pada segmentasi

¹¹ Idrus Ruslan, “Membangun Civil Religion pada Masyarakat Plural: Dilema Pancasila dalam Era Reformasi”, *al-Adyan*, Vol. 6, No. 2 (2011), 1-24.

¹² Yuswohady, *Marketing Muslim Middle Class* (Jakarta: Gramedia, 2013), xiv-xvi.

kelompok ini Islam digunakan hanya sebagai simbol formal saja. Oleh karena itulah, kelompok Kelas Menengah ini adalah kelas *free rider* di mana mereka akan selalu ingin tergabung menjadi bagian dari komunitas meski belum secara utuh menjalankan perintah agama. Sebenarnya kelompok Islam KTP merupakan kelompok Islam mayoritas dalam masyarakat kita. Mereka bersedia distempel “Islam” agar secara mudah diterima oleh masyarakat sekitarnya, meskipun mereka sendiri juga belum tentu menjalankan ibadah; namun yang penting adalah tetap umat Islam.

Kelas Menengah universalis merupakan kelompok Muslim Kelas Menengah yang seimbang baik dalam pengajaran substansi agama maupun juga praktiknya di lapangan. Kelompok Kelas Menengah ini bisa dikatakan sebagai kelompok Kelas Menengah religius sekaligus juga puritan. Hal ini dikarenakan cara pandang mereka dalam melihat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Pada umumnya, mereka merupakan hasil didikan dakwah majelis taklim yang tersebar di berbagai kota sehingga mereka memiliki cara pandang sesuai dengan ajaran dakwah yang mereka anut. Namun demikian, tingkat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam sendiri masih skriptural dan belumlah substansial. Hal itulah yang kemudian dengan mudah menempelkan sikap *prejudice* terhadap kelompok masyarakat yang tidak sealign dengan dakwah dengan mereka. Oleh karena itu, biasanya terdapat pengelompokan kelas menengah Muslim berdasarkan dakwah yang mereka terima. Peran ulama kemudian menjadi penting dalam mengarahkan umatnya untuk menjadi lebih baik. Adanya pengajian-pengajian maupun juga *istighâthah* yang marak terjadi di perkotaan juga merupakan bagian dari upaya memproduksi Kelas Menengah model seperti ini. Dengan demikian, mereka akan menjadi loyalis dan setia hanya pada ulamanya masing-masing.

Kelompok Kelas Menengah rasionalis adalah kelompok yang bisa dikatakan juga sebagai kelas pragmatis di mana cara pandang mereka dalam melihat Islam sendiri lebih bersifat opsional sesuai dengan kebutuhan. Mereka akan menjadi Muslim Kelas Menengah manakala berada dalam lingkungan mayoritas Muslim, namun mereka juga menjadi kelompok Kelas Menengah modern jika berada di lingkungan yang mendukung. Oleh karena itulah, penerimaan mereka terhadap Islam juga fleksibel. Dikarenakan sifat mereka yang fleksibel,

menjadikan nilai Islam dan modernitas kemudian saling berkontestasi. Pengedepanan etika *shar'at* yang ditekankan oleh ajaran Islam kemudian hanya menjadi pilihan saja.

Sedangkan kelompok Kelas Menengah konformis adalah perwujudan kelompok Kelas Menengah yang konservatif. Mereka pada umumnya merupakan kelompok Kelas Menengah yang sudah sangat paham akan substansi pemahaman Islamnya. Namun demikian, mereka memiliki pandangan kolot untuk melihat dinamika kehidupan. Umumnya mereka cenderung memaksakan kaidah-kaidah agama secara skriptural untuk menyelesaikan masalah. Mereka menganggap modernisasi dalam masyarakat sebagai hal tabu dan islamisasi adalah cara untuk menjadikan Muslim Kelas Menengah menjadi lebih terarah. Pada level ini, mereka akan bersikap intoleran terhadap adanya perbedaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran agama.

Tipologi lain yang bisa dijelaskan dalam mengonstruksi identitas kelompok Muslim Kelas Menengah dapat dikatakan dari proses penerimaan Islam sebagai nilai aksetis. Dalam hal ini terdapat tiga karakteristik Muslim Kelas Menengah sendiri yakni *orang islami*, *orang kearab-araban*, dan juga *orang religius*. Pembagian kelompok tersebut didasarkan pada ekspresi identitas yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Biasanya yang mereka tampilkan adalah ingin mendapatkan adanya efek eksternal maupun juga *feedback* dari kelompok masyarakat lain terhadap identitas Muslim yang mereka kenakan. Adapun penjelasan dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Pertama, orang islami merupakan representasi kelompok Muslim Kelas Menengah yang menampilkan sisi Islam dengan modernitas tanpa harus mengurangi sisi *shar'ah*nya. Fenomena ini marak terjadi dalam kasus Muslim Kelas Menengah urban di kota-kota besar Indonesia. Identitas islami, terutama bagi kalangan perempuan, biasanya ditandai dengan pemakaian pakaian Muslimah terbaru yang dipadu dengan adanya aksesoris pemanis. Utamanya mereka akan selalu *update* dengan *trend* baju yang dikeluarkan oleh Dian Pelangi, mengikuti tutorial memakai jilbab, maupun juga menggunakan kosmetik Wardah. Sedangkan bagi kalangan pria, mereka tidak begitu mencolok, hanya saja pada hari Jumat mereka akan menggunakan semacam baju *koko* (kemeja Muslim) modifikasi. Pada dasarnya mereka berupaya

menunjukkan sisi kesalehan sosialnya dengan mengikuti berbagai macam pengajian majelis taklim yang diselenggarakan di berbagai tempat. Selain itu mereka juga rajin bersedekah serta menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka pada umumnya menerapkan sisi Islam secara fleksibel dan beradaptasi dengan kondisi modernitas di dalam masyarakat.

Kedua, orang religius adalah kelompok Kelas Menengah yang menampilkan sisi keislamannya dengan produk yang memang mendukung. Misalnya, seorang habib dan jemaahnya akan menggunakan pakaian gamis berwarna putih, *kafiyeh*, maupun sorban untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kalangan religius. Sementara itu bagi kaum perempuan, mereka akan lebih tertutup pakaiannya dan juga menggunakan *hijab* yang lebih lebar dan panjang dari *hijab* pada umumnya. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meligitimasi bahwa mereka benar secara nyata menerapkan nilai-nilai Islam, tidak hanya dalam level substansi namun juga praksis di lapangan.

Ketiga, orang kearab-araban yaitu kelompok Kelas Menengah yang pada umumnya terpengaruh oleh adanya gegar budaya populer Arab yang masuk ke Indonesia. Dalam persepsi mereka dengan meniru berbagai macam budaya Arab maka mereka sudah dianggap sebagai orang Islam yang beramal secara *kaâffab*. Gejala Muslim Kelas Menengah kearab-araban ini muncul karena adanya infiltrasi ajaran Islam Timur Tengah ke Indonesia tanpa ada filterisasi sebelumnya. Akibatnya, mereka secara mentah menelan indoktrinasi seperti itu. Mereka cenderung akan mengelompok dan mengeksklusifkan diri menjadi kelompok tersendiri. Pada umumnya mereka menjalankan usahanya dengan berdagang, namun tidak menutup kemungkinan juga bekerja di instansi.

Konsumsi sebagai Faktor Pembentuk Identitas

Konsumsi tampil menjadi unit analisis dalam memberi kerangka terhadap pencairan identitas bagi Muslim Kelas Menengah. Dalam hal ini, kesalehan sosial—yang menjadi misi utama dalam Muslim Kelas Menengah—dielaborasi lebih lanjut dalam konteks pemenuhan kesenangan (*leisure*) dan juga kepuasan (*pleasure*). Artinya, bahwa ibadah kini tidak hanya dimaknai secara teologis *an sich*, namun juga bentuk-

bentuk ajang silaturahmi bagi sesamanya. Ketiga faktor tersebut juga menunjukkan bahwa proses penerimaan terhadap Islam kini sudah mulai meluas, bahkan sudah merambah aspek non ibadah. Meskipun masih dimaknai secara simbolis, namun secara perlahan hal itu menjadi bagian dari afiliasi dan afinitas kelas. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Muslim Kelas Menengah jika belum mengonsumsi barang tertentu. Hal itulah yang kemudian menjadikan orang berusaha menyamakan diri terhadap standar komunal itu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa simbol-simbol seperti halnya shari'ah dan halal adalah indikator penting dalam menggiring preferensi Muslim Kelas Menengah terhadap produk-produk barang. Sekarang ini yang tengah mewabah adalah produk yang mengatasnamakan shari'ah seperti halnya bank shari'ah, perumahan shari'ah, sekolah shari'ah, dan musik shari'ah. Adanya berbagai macam produksi barang tersebut menunjukkan bahwa Muslim Kelas Menengah Indonesia merupakan pasar potensial untuk digarap oleh kalangan kapitalis. Kondisi tersebut sebenarnya juga didorong oleh adanya komoditisasi ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadith Rasul untuk memperkuat citra produk tersebut agar terkesan lebih "Islam". Selain itu, peran ulama sebagai *endorser* juga sangat penting dalam mengarahkan umatnya untuk mengonsumsi produk shari'ah tersebut.

Selain itu pula, komoditisasi terhadap ayat dan Hadith juga berdampak pada usaha memopulerkan ibadah sebagai gaya hidup. Dewasa kini dengan munculnya berbagai macam lembaga filantropis seperti halnya Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, ACT, Rumah Zakat, dan Manajemen Qolbu merupakan bagian dari upaya menjadikan ibadah sebagai gaya hidup bagi Muslim Kelas Menengah Indonesia. Tumbuhnya berbagai macam organisasi filantropis sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya memopulerkan ayat dan Hadith untuk bisa diimplementasikan oleh masyarakat.

Booming terhadap munculnya produk-produk shari'ah tersebut sebenarnya juga merupakan bagian dari *counter hegemony* terhadap maraknya produk budaya pop Asia Timur maupun Barat. Hal tersebut kemudian mendorong Muslim Kelas Menengah menciptakan produk sendiri untuk kemudian digunakan sendiri. Menguatnya pasar konsumsi Muslim Kelas Menengah ini juga berkelindan dengan pertumbuhan Muslim Kelas Menengah di berbagai tempat. Implikasinya, secara

positif dengan semakin membudayanya ibadah menjadi gaya hidup bagi Muslim Kelas Menengah berdampak pada bahwa kesalehan sosial itu memang terbukti. Selain itu, hal ini juga karena faktor sugestif yang disampaikan melalui komodifikasi ayat maupun Hādīth yang membuat kelompok Muslim Kelas Menengah terdorong untuk menggunakannya. Implikasi negatifnya adalah bahwa dengan semakin kasualnya ibadah menjadi gaya hidup, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah adanya pengejaran gengsi yang ingin diraih agar bisa dilihat dan dipandang oleh orang lain. Hal itulah yang kemudian justru semakin menjauhkan seseorang dari nilai-nilai luhur shari'ah tersebut.

Menguatnya konsumsi bershari'ah tersebut sebenarnya juga menegaskan bahwa pengajaran Islam masih berada dalam level skriptural. Shari'ah hanya menjadi *icon* untuk mengajak orang untuk segera mengonsumsi barang tersebut agar menjadi orang Islam, namun belum tentu hal tersebut secara benar dan nyata menganut prinsip Islam secara komprehensif. Adanya sentuhan modernitas dalam budaya populer Islam, sehingga menciptakan adanya Muslim Kelas Menengah baru, juga menunjukkan adanya modernitas yang menjadi poin penting dalam membentuk Muslim Kelas Menengah Indonesia. Maka, sekiranya perlu dirumuskan kembali usaha pembangunan masyarakat Muslim Kelas Menengah baru tersebut.

Catatan Akhir

Pencarian identitas bagi Muslim Kelas Menengah Indonesia pasca Orde Baru telah menemui babak baru. Adanya benturan budaya dengan Barat maupun Asia Timur yang berpengaruh secara global telah mendorong adanya Muslim Kelas Menengah untuk membentuk identitasnya sendiri. Proses menuju kesalehan sosial (*social piety*) yang menjadi kunci awal kemudian berkembang menjadi sebuah kesenangan dan juga kepuasan.

Maraknya berbagai macam budaya populer Islam sendiri merupakan bagian dari proses pembentukan identitas tersebut. Identitas tersebut terbentuk karena budaya kasual dan komunal yang terus tumbuh dalam masyarakat sehingga menciptakan budaya Islam Populer. Implikasinya kemudian berdampak pada proses penerimaan Muslim Kelas Menengah tersebut. Adanya berbagai macam tipologi Kelas Menengah sebenarnya menunjukkan bahwa terdapat segregasi

dalam Muslim Kelas Menengah baik secara ideologis maupun non ideologis. Selain halnya masalah ideologi, pola lain yang perlu dicermati adalah aspek teologis yang tentu saja sudah berbeda. Dalam tataran yang lebih kompleks, proses pendalaman Islam sendiri juga belumlah sempurna dikarenakan Islam masih dimaknai secara permukaan dan skriptural. Oleh karena itu, hadirnya berbagai macam “produk islami” merupakan bagian dari cara untuk memopulerkan Islam secara riil.

Studi mengenai pencarian identitas bagi Muslim Kelas Menengah ini perlu untuk dielaborasi lebih dalam. Hal ini terutama tentang bagaimana kontestasi antara Kelas Menengah yang menganut mazhab formalisasi Islam dan pribumisasi Islam dalam mengartikulasikan identitas mereka masing-masing.

Daftar Rujukan

- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movement and The Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Budiman, Manneke. “The Middle Class and Morality Politics in The Envisioning of the Nation in Post-Suharto Indonesia”, *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 12, No. 4, 2011.
- Hasan, Noorhaidi. *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politic*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Hoesterey, James dan Clark, Marshall. “Film Islami: Gender, Piety and Pop Culture in Post-Authoritarian Indonesia”, *Asian Studies Review*, Vol. 36, No. 1, 2012.
- Menchik, Jeremy. “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”, *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 56, No. 3, 2014.
- Roy, Oliver. *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Ruslan, Idrus. “Membangun Civil Religion pada Masyarakat Plural: Dilema Pancasila dalam Era Reformasi”, *al-Adyan*, Vol. 6, No. 2, 2011.
- Weintraub, Andrew N. “The Study of Islam and Popular Culture in Indonesia dan Malaysia”, dalam Andrew N. Weintrau dkk, *Islam*

- and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. New York: Routledge, 2011.
- Wilson, Ian Douglas. *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia*. London: Routledge, 2015.
- Yuswohady. *Marketing Muslim Middle Class*. Jakarta: Gramedia, 2013.